

SEMINAR NASIONAL
AGAMA & PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL
UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA – 9 DESEMBER 1997

HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA
DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL:
Tinjauan Konseptual

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

PENGANTAR

Agama, berkah atau kutuk bagi suatu bangsa? Pertanyaan yang kelihatan tidak tepat itu, sebagaimana kita ketahui, tetap aktual. Agama yang dari dirinya sendiri mestinya merupakan sumber kedamaian, kebaikan, keadilan dan kesediaan untuk saling menerima dalam kenyataan dapat menjadi sumber kecurigaan, kebencian dan bahkan kekerasan dan kebrutalan.

Tentu saja betul bahwa bukan agama an sich yang demikian, melainkan manusia-manusia yang beragama. Tetapi justru itulah masalahnya: Kok manusia yang beragama sama melakukan hal-hal yang sangat memalukan? Pertanyaan itu tidak boleh dihindari. Karena dengan menutup-nutupi mata masalahnya tidak akan pergi.

Maka tepat juga peran agama dalam sebuah negara dipertanyakan dari sudut ketahanan nasional. Yang dapat dipertanyakan, misalnya, apakah agama dapat menyumbang sesuatu kepada ketahanan nasional, atau, bagaimana, sekurang-kurangnya, supaya tidak mengancamnya?

Untuk merefleksikan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, sebaiknya kita menempatkannya ke dalam konteks yang lebih mendasar. Berikut ini saya akan (1) menunjuk ke sebuah tendensi global yang perlu diwaspadai, (2) membuat beberapa catatan tentang sikap internal agama sendiri, (3) menunjuk pada pengaruh situasi sosial, untuk (4) bertanya apa yang dapat kita antisipasikan.

REPRIMORDIALISASI

Apabila kita memperhatikan perkembangan-perkembangan global, maka kelihatan sebuah trend yang mengkhawatirkan: Ambruknya ideologi-ideologi keselamatan sekuler

besar seperti sosialisme dan komunisme tidak jadi membuat masyarakat dunia menjadi lebih berdamai, lebih beradab, lebih terbuka, lebih positif. Melainkan, dan itu trend yang sebenarnya sudah tampak jelas sejak akhir tahun 70-an, semakin banyak gerakan revolusioner dan kelompok teroris mendasarkan diri pada loyalitas primordialistik, pada tuntutan etnik atau puritanisme agama (dan memang paling ganas kalau dua-duanya muncul bersama, seperti di bekas Yugoslavia atau di Srilangka). Kita melihat semacam atrofi kemampuan nasionalisme untuk mempersatukan etnik-etnik dan agama-agama yang berbeda. Semakin banyak konflik bersenjata maupun saringan terorisme mendasarkan apa yang mereka sebut perjuangan mereka atas agama.

Mengingat Indonesia sendiri masyarakat yang majemuk dalam pelbagai dimensi, dalam dimensi budaya, suku dan etnik serta agama, Indonesia malah termasuk salah satu masyarakat paling majemuk di dunia, kita harus memperhatikan serta menganalisa trend itu dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan langsung panik, tetapi juga tidak dengan sikap sok atau puas diri. Dari beberapa kerusuhan di daerah kita tahu bahwa kombinasi yang mudah meledak adalah apabila penduduk asli dan pendatang baik berbeda suku maupun agamanya.

Suatu analisa lebih mendalam akan menunjukkan bahwa ekstremisme religius umumnya meledak dalam pemberontakan atau pun aksi- aksi kelompok-kelompok teroris apabila ada dua faktor: Yang pertama ada faktor di dalam agama, yang kedua situasi medan sosial. Yang pertama adalah kalau terjadi ideologisasi dan ekstremisme di dalam umat sebuah agama, biasanya di kalangan sekelompok intelektual agama, yang menganut faham agama yang -menurut ukuran normal agama itu sendiri- ekstrem, dan itu sering berarti fundamentalistik, atau puritanistik, atau eksklusivistik, atau pun hanya negatif dan fanatik terhadap apa saja yang bukan lingkungan mereka. Sikap ini lalu membuat tertutup terhadap segenap nilai yang tidak berpakaian agama, entah nilai-nilai kebudayaan lokal, nilai-nilai kebangsaan maupun nilai-nilai kemanusiaan universal.

Faktor kedua adalah situasi masyarakat: Masyarakat sea-gama merasa berkekurangan, diliputi kemiskinan, perumahan kumuh, tak ada masa depan ekonomis, ada kesenjangan ekonomis mencolok. Pendek kata, masyarakat semakin mendalam merasa tidak puas. Terutama apabila frustrasi itu disertai pengalaman ketidakadilan besar, atau penindasan kejam oleh pemerintah atau sebagainya, atau terdapat diskriminasi berat terhadap sebuah kelompok etnik dan/atau

agama, lalu mereka bisa terbuka pada ekstremisme yang pada umumnya terbatas pada kaum intelektual saja.

Mari kita melihat sedikit dua faktor itu.

INKLUSIF ATAU EKSKLUSIF

Apakah agama mendukung hidup bersama secara damai dan positif sangat tergantung dari apakah umatnya, dan terutama para panutannya, bersifat eksklusif atau inklusif. Inklusif akan berarti mampu untuk bertoleransi, untuk terbuka, untuk bekerja sama, untuk berwawasan luas. Eksklusivisme menghasilkan sikap terbalik.

Eksklusivisme adalah tendensi untuk menuntut agar seluruh kehidupan bangsa dijalankan secara eksklusif menurut cita-cita agamanya sendiri. Dalam masyarakat pluralis, di mana ada beberapa agama dan banyak golongan budaya, eksklusivisme akan membuat golongan agama itu sendiri resah terus karena mereka tidak dapat menerima suatu pola kehidupan bersama, di mana semua warga dapat merasa ikut memiliki. Hanya karena negara menjamin lingkungan sosial yang memungkinkan semua golongan dalam masyarakat untuk krasan dan hidup menurut identitas mereka, pandangan eksklusif akan merasa dilalaikan. Identifikasi dengan tujuan-tujuan nasional akan sulit.

Eksklusivisme sering bersamaan dengan tendensi-tendensi puritanistik (dari Puritanisme, aliran keras dalam Gereja Anglikan Inggris abad ke-16 yang mau mempurifikasi Gereja dari sisa-sisa Katolik, dan sesudah ditolak, sebagian pindah ke Amerika sebagai the pilgrim fathers) yang mau membersihkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar asialiah agama itu sendiri. Terutama dari semua unsur "manusiawi" seperti budaya lokal dan cita-cita moral dan politik yang lebih luas. Karena apa pun yang tidak dari agama sendiri ditolak, puritanisme membuat dingin, kalau tidak malah bermusuhan, dengan nilai-nilai budaya lokal, dengan faham-faham non-agama seperti kebangsaan dan kemanusiaan universal tadi.

Makin kuat tendensi-tendensi eksklusivistik dan puritanistik, makin sekelompok orang akan merasa kurang tenang. Karena semua pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan puritan itu akan ditolak. Sikap itu pada umumnya tidak hanya menimbulkan kesulitan dengan penganut agama lain, melainkan dengan penganut agama sendiri karena di dalam semua agama besar ada pandangan yang berbeda mengenai gaya hidup menurut agama itu. Sehingga puritanisme apabila menjadi eksklusif, juga membersihkan umat agamanya sendiri dari semua pandangan yang plural, misalnya yang me-

nyangkut bentuk ibadat, pakaian, kewajiban dlsb. Mudah saudara seagama dikafirkan.

SITUASI DAN KONDISI SOSIAL

Mari kita bertanya: Apa yang dapat mendukung meluasnya kecenderungan eksklusivistik dan puritanistik? dan penolakan semua nilai yang tidak langsung agamis? Kiranya ada dua. Yang satu internal. Dalam kebanyakan agama ada pelbagai penghayatan terhadapnya. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup, ada yang "liberal" dan ada yang "fundamentalis", ada yang tenang dan ada yang fanatik. Justru kaum intelektual tidak jarang cenderung ke radikalisme ideologis.

Akan tetapi tendensi-tendensi negatif itu biasanya baru akan meluas ke umat lebih jauh apabila situasi masyarakat memburuk: Masyarakat kehilangan harapan akan perbaikan nasib, ada kesenjangan mencolok, masyarakat merasa berlangsungnya ketidakadilan yang berkelanjutan, tak ada perbaikan, masyarakat merasa terancam dikurbankan demi pembangunan dlsb. Dalam situasi itu fanatisme dan sikap bermusuhan dengan segala apa yang "lain", yang bisa mengancam. Apabila masyarakat hidup dalam suasana sejahtera, harmonis dan terbuka, umat beragama -meskipun mereka yakin akan dirinya sendiri dan tidak menyetujui ucapan senaknya bahwa "semua agama sama saja"- tidak condong

memaksakan diri pada penganut agama lain; mereka sepakat bahwa tak ada gunanya memeluk agama kecuali karena diyakini: mereka bersedia untuk memberikan hak hidup kepada umat beragama lain; mereka juga bersedia untuk menerima bahwa masyarakat dan negara diselenggarakan sedemikian rupa hingga semua umat beragama dapat hidup berdampingan secara wajar, sesuai dengan identitas masing-masing dan dalam derajat yang sama. Mereka bersedia mengakui adanya budaya setempat, adanya nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, mereka mencintai bangsa dan negara sendiri.

Tetapi dalam masyarakat tertutup, di mana misalnya kebebasan untuk berbicara dan menyuarakan kritik secara serius dibatasi, di mana atmosfer dalam masyarakat semakin sumpek dan sumuk, kepicikan dan fanatisme menemukan tanah ideal untuk berkembang dan meluas. Begitu pula dalam situasi ketidakadilan, kesenjangan yang mencolok, ketidakdaksamaan kesempatan untuk mencapai hidup yang nyaman dan aman, apabila sebagian masyarakat takut, takut digusur, takut ditindas dsb., kelompok-kelompok tertutup dan fanatik akan mudah didengar. Ada konsensus luas di antara para ahli ilmu-ilmu sosial bahwa tendensi-tendensi fundamentalistik hampir selalu berkaitan dan represi ekonomis dan politik yang berkelanjutan.

Dalam suasana ketidakadilan, frustrasi, takut dan tak berdaya itu bisa memberi angin pada pendapat fundamentalistik bahwa korupsi dan segala ketidakberesan itu disebabkan oleh karena hukum agama tidak dilaksanakan secara bersih. Dalam suasana itu nilai-nilai budaya, nasional dan kemanusiaan akan dicap sebagai sekularisme dan kesesatan.

APA YANG DAPAT DIBUAT?

Apakah primordialisasi itu dapat dihindari? Dari pertimbangan di atas kelihatan bahwa itu memang mungkin dan sebenarnya tidak begitu sulit: Asal semua komunitas etnik dan agama diperlakukan dengan adil, nyata-nyata menikmati hak dan dibebani kewajiban yang sama sebagai warga negara, terutama, asal mereka merasa dihormati dan tidak terancam dalam identitas komunalnya, tidak ada alasan mengapa suatu tendensi primordialistik harus meluas. Dalam keadaan sejahtera dan adil seruan kelompok-kelompok intelektual agamis yang ekstrem biasanya tidak akan menemukan gema dalam umat mereka.

Kiranya pelajaran juga jelas: Kita harus menjadi jauh lebih peka terhadap perasaan keadilan, harapan wajar identitas kultural, dan aspirasi masyarakat pada umumnya. Kiranya yang membuat fanatisme ekstrem, separatis dan antinasionalis keagamaan bisa meluas adalah perasaan keterhinaan

hati karena pengalaman ketidakadilan. Itulah yang harus kita pelajari.

Jadi negara, penguasa, pemerintah betul-betul ditan- tang. Masalah ketidakadilan, penindasan, perasaan keteran- caman dalam seluruh masyarakat atau dalam sebagiannya adalah pertama-tama tanggungjawab, atau lebih tepat: dosa mereka. Merekalah yang sebenarnya pantas dituduh subver- sif karena mereka yang mengancam kesatuan bangsa.

Akan tetapi, tanggungjawab tidak hanya boleh dilempar- kan pada pemerintah/penguasa. Agama-agama juga memikul tanggungjawab. Dan itu berarti: para pemimpin, panutan, pemikir dan intelektual agama, dan bukan umat biasa. Apabi- la mereka membiarkan faham-faham negatif, ajakan permu- suhan, sikap-sikap eksklusif dan puritanisme merajalela, mere- ka ikut mempersiapkan krisis nasionalisme. Pada akhir abad ke-20 para panutan agama tidak mempunyai alasan lagi un- tuk lari dari tanggungjawab mereka untuk membawa umat- umat mereka ke sikap yang toleran, terbuka, mampu hidup dalam suasana pluralistik. Mereka berhadapan dengan sebu- ah pilihan: Mau membuka diri pada cita-cita demokrasi dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu berarti: pada ci- ta-cita martabat kemanusiaan universal, atau mereka menu- tup diri dalam eksklusivitas dan egosentrisme, pendeknya memilih reprimordialiasi?

Tantangan ini mengenai sikap-sikap yang menentukan: Maukah mereka menjadi pendukung utama etika kemanusiaan universal dan bertekad mewujudkan struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomis dunia yang sedang datang sesuai dengan martabat manusia itu? Hal mana juga berarti bahwa mereka terbuka pada cita-cita nasional, pada kebudayaan-kebudayaan lokal yang sudah ada, pada pluralitas. Ataukah mereka menjadi takut, negatif, menutup diri sehingga semakin akan dipersalahkan sebagai sumber konflik dan kekejaman? Dapatkah agama-agama mengatasi godaan untuk menjadi sempit, ego-sentrik, dan eksklusif, serta, sebaliknya, berani menjadi benteng toleransi, pergaulan yang beradab, keadilan, prihatin pada fihak lemah entah termasuk kelompok agama sendiri entah tidak? Maukah mereka menjadi pelindung segala macam minoritas dan pembela hak-hak mereka yang tertindas tanpa membedakan menurut golongan? Dapatkah mereka membuat kepentingan seluruh umat manusia, segenap orang, termasuk yang lain sikap hidup dan kepercayaannya, menjadi keprihatinan mereka, tanpa pamrih? Pendeknya bersediakah agama-agama menjadi penegak keberadaban, keadilan dan solidaritas antara manusia?

Tantangan itu juga dapat dirumuskan begini: Apakah agama-agama berani merealisasikan universalisme positif yang ditiptkan Sang Pencipta kepada mereka, atau mereka memilih

jalur kesempitan primordialisme? Apakah agama-agama menjadi pembela hak-hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial, atau menjadi kubu-kubu perpecahan bangsa, intoleransi, fanatisme dan kekerasan?

AGAMA, NEGARA DAN KETAHANAN NASIONAL

Jelas sekali bahwa ketahanan nasional bangsa Indonesia akan melemah semakin tendensi-tendensi primordialistik, eksklusivistik dan puritanistik menguat dalam umat-umat beragama. Sebaliknya, agama yang inklusif, terbuka dan meminati nilai-nilai budaya lokal, bangsa dan kemanusiaan universal akan menjadi pendukung kesatuan dan persatuan bangsa dan mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam pembangunan. Apa yang dapat dilakukan. Berikut ini beberapa saran.

1. Dalam umat-umat beragama perlu didukung proses belajar agar mereka sanggup untuk secara rasional maupun emosional menerima pluralitas masyarakat kita, menerima bahwa pola kehidupan nasional harus dapat diterima oleh semua dan tidak boleh hanya mencerminkan cita-cita salah satu golongan saja, agar mereka mengembangkan kemampuan untuk bertoleransi positif, mampu menghargai saudara yang beda agamanya dalam identitasnya sendiri.

2. Di situ para panutan agama memainkan peranan besar: para pemimpin formal dan non-formal, para rohaniwan, ulama, pendeta, pastur dll., dan, sangat penting, para cendekiawan dan tokoh intelektual umat. Apakah mereka secara konsisten menyuarakan keterbukaan, toleransi dan keterlibatan pada cita-cita bangsa? Segala hasutan dan omong miring tentang umat-umat lain merupakan racun terhadap persatuan bangsa. Sebaliknya, sikap terbuka dan positif para panutan sangat berpengaruh atas sikap umat.
3. Akan tetapi, yang lebih menentukan adalah apakah rakyat Indonesia merasa dijamin dalam martabat mereka di dalam kehidupan masyarakat. Yang membuat orang mudah marah, sempit, curiga, tidak toleran, bersedia rusuh, cepat mengambil jalan kekerasan tidak berkaitan dengan agama, melainkan dengan situasi mereka yang sering terjepit, terhina, tersingkir, tereksploitasi. Kesenjangan yang begitu mencolok, ketidakadilan yang menyala di mana orang kecil terancam tergusur dan orang-orang atas sementara ini semakin memiliki seluruh negara dan tidak bersedia ikut prihatin dengan masyarakat.
4. Namun ada yang tidak kalah penting, dan justru di sini menurut pendapat saya elit politik sekarang masih buta ayam. Salah satu faktor yang membuat masyarakat mudah meledak, dan kaum kritis mudah menyindir, adalah suasana

sumpek dan tertutup kehidupan publik. Usaha-usaha pemerintah sewaktu-waktu untuk meningkatkan keterbukaan semuanya macet di tengah jalan. Macet karena akhirnya pemerintah takut sendiri. Tetapi ketertutupan di mana kritik yang tajam dan tuntutan perubahan, meskipun seluruhnya konstitusional, dapat membawa orang didakwa dengan UU subversi, menghina pejabat dsb. itu mempunyai akibat bahwa segenap keluhan dan kritikan dianggap sudah mengancam sistem. Sistem menjadi amat peka. Maka ternyata kritik yang paling efektif dewasa ini adalah kerusuhan. Kalau masyarakat nekad rusuh, tentara saja tidak berani menembak. Saluran untuk berkeluh, mengkritik, menyatakan perasaan tidak senang dengan kebijakan pimpinan pemerintah sama sekali tidak ada. Lembaga-lembaga konstitusional sedikit pun tidak berani mengkritik atau menuntut pertanggungjawaban. Ketertutupan ini yang menciptakan suasana represif menyeluruh yang dialami masyarakat Indonesia sekarang. Suasana ini sudah tentu mempertajam ketegangan-ketegangan dan mendorong orang untuk mencari ketentraman hati dalam kesatuan primordial.

5. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah meracuni kehidupan seluruh bangsa, dari atas sampai ke bawah, mudah menimbulkan perasaan jijik di dalam masyarakat: kok macam itu yang memimpin kita. Orang lalu berpaling ke aga-

ma untuk mencari wilayah yang masih bebas dari kebusukan korupsi itu. Sekaligus keterlibatan nasional dapat melemah karena ia mudah menghubungkannya dengan korupsi dan amoralitas kehidupan publik.

6. Pemerintah yang bertanggungjawab agar segenap warga, golongan, suku, umat, daerah merasa ikut memiliki negara ini, diperlakukan dengan sama, semua terjamin dalam identitas sosial dan kulturalnya. Di sini dapat disebut masalah hubungan penduduk aseli dengan pendatang di banyak daerah. Pemerintah dengan pendekatan top down tidak peka terhadap identitas kultural masing-masing kelompok dan suku di daerah. Kepentingan penguasa dan konglomerat akan dilaksanakan tanpa banyak menghiraukan perasaan penduduk setempat, begitu masilnya kepentingan raksasa konsesi-konsesi hutan tidak dapat diimbangi oleh kepentingan penduduk aseli akan keutuhan lingkungan budaya mereka. Dengan sendirinya perasaan kesatuan berbangsa dapat terancam.

PENUTUP

Jadi salah kalau kita mencari sumber masalah agama pada agama semata-mata. Yang perlu adalah tindakan tegas untuk mengeringkan rawa korupsi yang sedang mencaplok bangsa ini dan yang hasil buruknya dirasakan terutama oleh

kelas bawah dan menengah dalam krisis ekonomi sekarang. Lalu perhatian serius harus diberikan kepada masalah kesenjangan, kekerasan sosial dan ketidakberdayaan orang kecil yang tidak dianggap. Dengan lain kata, penegakan keadilan sosial merupakan kunci dalam mempositifkan potensi agama-agama, plus keterbukaan demokratis yang nyata. Kita sekarang dalam krisis ekonomi paling berat sejak 30 tahun. Segala apa yang dibangun oleh Orde Baru dapat hancur karena inkonsistensi dan pamrih SENDIRI. Jadi krisis ekonomi dapat menjadi krisis nasional. Bicara tentang Pancasila tidak cukup. Yang perlu, melaksanakannya.■
